

“STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SERIBU EMBUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

Ulvia Noer Uyunina
Jurusan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang, 65142
Email : ulvianoer@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana program pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Bagaimana pelaksanaan pembangunan seribu embung dalam mencapai tujuan global untuk pengentasan kelaparan melalui ketahanan pangan dan mendorong pertanian berkelanjutan. Pembangunan ini saat menarik untuk dibahas dan dianalisis karena melibatkan segala aspek-aspek pembangunan, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Program yang dirumuskan melalui RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai strategi mewujudkan Visi besar Kabupaten Bojonegoro menjadi “Lumbung Pangan dan Energi Negeri” pada era kepemimpinan Drs. Suyoto M,si yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2018 sejalan dengan habisnya masa jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga fenomena sosial yang terjadi bisa dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan menggunakan teknik *snowball*, serta metode pengumpulan data meliputi data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan embung ini baik sebagai startegi memaksimalkan irigasi di Kabupaten Bojonegoro. Namun program pembangunan ini hanyalah sekedar pembangunan secara teknis dan infrastruktur saja tidak diikuti dengan konsepsi yang matang dan arah kebijakan dalam kedaulatan pangan yang diharapkan oleh Kabupaten Bojonegoro

Kata kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Program Pembangunan Seribu Embung

PENDAHULUAN

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan untuk keberhasilan pembangunan. Karena peran pemerintah dalam pembangunan merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya otonomi daerah yang mengharuskan suatu daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri maka dalam sektor pertanian menjadi satu

bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah.¹ Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada kabupaten/kota, karena hasil dari pertanian merupakan sumberdaya alam yang pada umumnya ada di daerah, dan dalam kegiatan pengelolanya dapat dipastokan bahwa

¹ Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU Pemda) ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda menjelaskan bahwa pemerintah daerah

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya, hubungan yang dimaksud yaitu meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

bobot kegiatan akan bergeser ke Daerah.² Kegiatan ini dimulai dari penyelidikan umum sampai eksploitasi dan pengelolaan. Akan menyerap perhatian dari daerah. Perizinan seluruhnya menjadi wewenang daerah, demikian juga pengawasannya.³ Selain wewenang yang dilimpahkan kepada daerah, maka pendanaan juga dilimpahkan kepada daerah tersebut menggunakan Dana Alokasi Umum. Tujuan otonomi daerah sendiri merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada kabupaten/kota bertujuan agar bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan pertanian di setiap daerah.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi bagian kewenangan dari pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi alam yang besar, tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam bidang pertanian. Menurut Simatupang, sektor pertanian masih ditempatkan sebagai sektor yang mendapat prioritas dengan skala tinggi dalam pembangunan bidang perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perannya dalam penyediaan pangan, pakan, energi, sebagai penyerap tenaga kerja, menjadi mata pencaharian pokok bagi penduduk bndi pedesaan. Posisinya yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan, berperan secara signifikan dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dan sebagai penghasil devisa bagi negara, hal itulah yang menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris.⁴

Sebagai daerah otonom pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki

kewenangan dalam mengurus rumah tangganya. Salah satu potensi kewenangan tersebut terdapat dalam sektor pertanian, dimana sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro ini cukup besar dan luas. Namun dengan sektor pertanian yang besar dan luas tidak menjadikan pertanian di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat hasil produktivitasnya. Banyak permasalahan pertanian yang menghalangi kemajuan sektor pertanian, misalnya permasalahan saluran irigasi yang minim serta tanah di Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas merupakan tanah liat yang memiliki sifat sulit untuk meresapkan air..

Dalam literatur kolonial Belanda, Bojonegoro selalu digambarkan sebagai salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Tanahnya tandus dan hampir tidak ada irigasi, lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk dan daerah yang subur di dekat Bengawan solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir selama musim hujan.⁵ Kondisi tanah di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar merupakan tanah grumosol dimana tanah ini merupakan tanah liat yang sangat susah digunakan untuk bercocok tanam. Minimnya saluran irigasi dan resapan air juga menjadi penghambat pemerintah untuk menyediakan pangan lokal untuk masyarakatnya, apalagi bencana kekeringan dan banjir yang juga menjadi persoalan serius dalam sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan kondisi tanah yang bermasalah, untuk itu pemerintah daerah mengembangkan inovasi-inovasi dalam sektor pembangunan. Salah satu pembangunan yang dicanangkan adalah

² Dapat dilihat : Barito Raya, "Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Mineral", 2009 dalam <https://antoniuspationom.wordpress.com/2009/08/03/otonomi-daerah-dan-pengaruhnya-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-mineral/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

³ Adapun kewenangan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama.

⁴ Minysah dkk, "Optimalisasi pemanfaatan lahan sawah irigasi untuk peningkatan produksi padi di provinsi Jambi". Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2014, 248.

⁵ Dr. C.L.M. Penders.1984, *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-east java-indonesia*

program pembangunan seribu embung. program ini merupakan program dimana setiap desa atau kecamatan dibangun embung (tadah hujan) agar mampu menampung sebagian air limpasan hujan agar tidak langsung mengalir ke sungai Bengawan Solo, sehingga air yang sudah tertampung dapat digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari mereka, misalnya untuk minum ternak, perikanan, dan tentunya pada tujuan utamanya pembangunan embung adalah untuk membantu para petani mengairi sawah mereka disaat musim kemarau tiba. Pembangunan ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan irigasi yang didukung dengan kondisi tanah yang buruk serta bencana alam kekeringan dan banjir.

Perkembangan inovasi ini dirumuskan melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 telah menetapkan strategi pengembangan dan peningkatan layanan irigasi dengan membangun daerah resapan air seperti sumur dan embung. Pembangunan irigasi ini merupakan salah satu Misi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dimulai pada tahun 2013 dengan tujuan mewujudkan Visi Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. Salah satu bentuk program yang dicanangkan adalah program pembangunan seribu embung. Program pembangunan infrastruktur pertanian ini disebut sebagai seribu embung bukan berarti jumlahnya ada seribu, namun menggambarkan jumlahnya yang banyak.⁶ Karena curah hujan yang tinggi dan sebagian belum tertampung maksimal maka dari sinilah

muncul inspirasi pembangunan seribu embung.

Dengan adanya rencana pembangunan sektoral maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana pembangunan ini dapat membawa pada pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek utamanya, yaitu keberlanjutan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan yang mana ketiga aspek tersebut sangat berkaitan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksanaan kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.⁷

Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu *“to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical*

⁶ Dapat dilihat, Arin Swandari, *“Bupati Bojonegoro: Berkat Embung, Kebahagiaan Rakyat Saya Meningkat”*, 2014. Dalam m.kbr.id/04-2014/bupati_bojonegoro_berkat_embung_kebahagi

aan_rakyat_saya_meningkat/34548.html diakses pada 20 Juli 2017 pukul 13.45 WIB

⁷ AG, Subarsono. 2010. *“Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta Pustaka Pelajar hlm 87.

effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”⁸

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi,⁹ antara lain sebagai berikut.

- 1) Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*). Masalah publik memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.¹⁰
- 2) Karakteristik Kebijakan (*ability of status to structure implementation*). Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.¹¹
- 3) Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Lingkungan kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik

yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilik (*Consituency Groups*), dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menurut Sutamihardja, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.¹³ Keterkaitan antara permasalahan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial menjadi anomali dalam konsep “*sustainable development*” (Pembangunan Berkelanjutan).

Konsep *Sustainable Development* memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan alam di masa depan, generasi yang akan datang “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”.

⁸ Abdul Solihin Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 64

⁹ *Op.cit*, Subarsono hlm 94

¹⁰ *Ibid.*, hlm 95

¹¹ *Ibid.*, hlm 97

¹² *Ibid.*, hlm 98

¹³ Sutamihardja, 2004. “*Perubahan Lingkungan Global*”, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB

Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek seperti, aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik dan budaya. Dalam lima indikator diatas juga terdapat tiga tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan berkelanjutan. Ketiga tolak ukur tersebut meliputi :¹⁴

- a) Pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan.
- b) Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam cital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.
- c) Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses

terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Dipilihnya SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai pengganti MDGs (*Millenium Development Goals*) karena daya dukung alam terhadap kehidupan manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan.¹⁵ Penurunan daya dukung alam itu seperti jumlah penduduk dunia yang terus meningkat dari 4 miliar menjadi 7 miliar, akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan manfaat SDA ini yang dikuatirkan akan merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia. Kehidupan penduduk lokal, terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan, terancam oleh bahaya banjir dan kekeringan. Karena itu, muncul kesadaran baru diantara negara-negara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.¹⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun 1992.

¹⁴ Sutisna, 2006. "Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan". Urban and Regional Development Institute dan Yayasan Sugijanto Soegijoko. Jakarta dalam Susi Lastrika Sinaga, "Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Bappeda Kota Malang)", Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya 2012, hlm 28.

¹⁵ A.H.Rahadian,2016. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan", Volume II, No. 01, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Hlm 52

¹⁶ Griggs,D. 2013. *From MDGs to SDGs: Key Challenges and opportunities*. Jerman: Monash Sustainability Institute.
<http://sustainabledevelopment.un.org/contact/documents/3490griggs.pdf>

¹⁷Ide atau gagasan tentang SDGs pertama kali disampaikan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dalam pertemuan tidak resmi di Solo, Indonesia, Juli 2011. Usulan ini terus bergulir dan menjadi perdebatan di kalangan anggota PBB dalam berbagai pertemuan tidak resmi untuk penyempurnaan usulan tersebut. Laan sekjen PBB yang dipersiapkan oleh Panel Tingkat Tinggi tentang Keberlanjutan Global juga memberikan dukungan yang signifikan terhadap SDGs.

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara integritas. Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai perlindungan lingkungan tetapi pemahaman tentang keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan alam. Dalam menjaga keseimbangan dan mencapai tiga pilar pembangunan serta tersebut maka disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:¹⁸

Gambar 2.2.1 Simbol 17 Tujuan Global Sdgs



Sumber : <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-sdgs-sustainable-development-goals.html>

Ke-17 (Tujuh Belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGS tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat disegala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemertaan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di

¹⁷ Dian Wahyudin, "Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Development Goals Di Indonesia" Volume III, No. 01, 2016. Hlm 35

¹⁸ Ishartono & Santono Tri Raharjo, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan" Volume 6 No.2, Social Work Jurnal.

- dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berkelanjutan dan berketahanan.
 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
 13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahanniklim dan dampaknya.
 14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
 15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara keberlanjutan, mengurangi tanah, memerangi pengguguran, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kekeringan, maka salah satu strategi yang paling murah, cepat dan efektif serta hasilnya langsung terlihat adalah dengan memanen aliran permukaan dan air hujan di musim penghujan melalui pembangunan embung. embung merupakan sistem atau istilah lokal yang pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat di dalam mengelola sumber daya air. Konstruksi embung berupa waduk penampungan yang terbuat dari timbunan tanah ataupun dari psangan batu yang dipakai sebagai sumber air untuk memberi/suplesi terhadap kebutuhan air pada areal di bawahnya, dimana pada umumnya sudah dipersiapkan pola tanam tadah hujan (gora) sehingga dapat diperoleh kontinuitas pemberian air untuk pertumbuhan tanaman dalam menghindari gagal panen.

Gambar 2.2.2 Contoh Gambar Embung



Sumber:
<http://bamboeroentjing.com/embung/>

SUMBER DAYA AIR

Sumber Daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan akitivitas

EMBUNG

lingkungan.¹⁹ Penggunaan air tawar dapat dikategorikan sebagai penggunaan konsumtif dan non-konsumtif. Air dikatakan digunakan secara konsumtif jika air tidak dengan segera tersedia lagi untuk penggunaan lainnya, misalnya irigasi (di mana pengupuan dan penyerapan ke dalam tanah serta penyerapan oleh tanaman dan hewan ternak terjadi dalam jumlah yang cukup besar). Jika air yang digunakan tidak mengalami kehilangan serta dapat dikembalikan ke dalam sistem perairan permukaan (setelah diolah jika air berbentuk limbah), maka air dikatakan digunakan secara non-konsumtif dan dapat digunakan kembali untuk keperluan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran atau menjelaskan suatu informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar dinamika yang diteliti secara komprehensif.

Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁰ Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan kepustakaan. Kedua jenis data bersifat saling menunjang dan memerlukan analisis lebih lanjut.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Snowball Sampling* yang merupakan teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang

mengelinding yang lama-lama menjadi besar.²¹ Dalam penentuan sample, pertamanya dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang terkait dengan pembangunan seribu embung dalam memandang lingkungan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam/*Indepth Interview*

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur

¹⁹ Dapat juga dilihat , https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air (diakses pada 18 Mei 2017)

²⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.87

²¹ Prof. Dr. Sugiyono.2008. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", Bandung: CV. ALFABETA, Hlm 85.

untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan lain yang menilai Dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro sebagai hubungan antara pemerintah dengan *Civil Society*. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data serta informan berdasarkan penelaan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Politik Ekologi yang dilakukan sebagai acuan untuk mengumpulkan data sekunder.

3. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro serta pengamat beberapa pembangunan embung yang sudah terealisasi dan gejala-gejala hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung adalah menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Mereka mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²²

Berikut ini penjelasan mengenai 3 alur kegiatan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang meliputi :²³

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian terkait dengan program pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

²² Miles dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications, 2014 hlm 8. Terjemahan Tjetjep Rohidi, UI-Press.

²³ *Ibid*; hlm 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan mengacu pada variable-variable dalam implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, bahwa program pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro ini pada mulanya terdapat isu atau masalah publik yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat terutama kelompok tani, dimana awal mulanya adalah adanya input dari masyarakat mengenai buruk dan minimnya irigasi di Kabupaten Bojonegoro sehingga mengakibatkan produksi panen tidak maksimal.

Berdasarkan input yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka pemerintah daerah melalui otonomi daerah berhak memproses secara politik dengan membuat suatu kebijakan atau program dimana hal tersebut nantinya merupakan perkembangan inovasi yang akan meminimalisir permasalahan irigasi di Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses politik pemerintah melalui SKPD yang terkait dan bertanggung jawab atas inovasi tersebut maka harus mempunyai konsepsi yang matang terkait konsep kedaulatan pangan yang akan diarahkan untuk mewujudkan Lumbung Pangan di Kabupaten Bojonegoro.

Setelah adanya kebijakan-kebijakan atau output dari pemerintah maka lingkungan masyarakat berhak mendukung dan menolak suatu kebijakan. Karena kebijakan ini yang nantinya akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap kelangsungan masyarakat sekitar. Masyarakat pada umumnya banyak yang menerima program tersebut, sebagian besar adalah masyarakat yang berada disekitar pembangunan embung yang mendapat dampak positifnya. Namun program pembangunan ini belum sepenuhnya menyentuh sasaran secara tepat, dikarenakan program ini hanya menyentuh

output secara teknis dan infrastruktur dan kurang memahami peta dan kondisi wilayahnya apakah cocok digunakan pembangunan yang melibatkan alam atau tidak.

***Sustainable Development Goals* Sebagai Landasan Pembangunan Seribu Embung.**

Dengan mengacu pada tujuan kedua *Sustainable Development Goals* secara global yang menyatakan bahwa “Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan” maka peneliti disini melakukan penelitian mengenai pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro sebagai strategi mewujudkan lumbung pangan dan energi negeri.

Tujuan dua dalam mengupayakan penyelesaian berkelanjutan ini untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya pertanian secara luas berkelanjutan.

mengenai *Sustainable Development Goals*, Kabupaten Bojonegoro sudah terlebih dahulu menerapkan sebagai landasan pembangunan wilayahnya. Dengan menggunakan landasan pembangunan berkelanjutan maka pembangunan akan menjadi terstruktur dan tepat sasaran. Namun sampai saat ini jika dilihat dari sisi pembangunannya sudah tepat dan baik secara teknik tetapi belum sempurna dalam pengelolaannya, apalagi jika penggunaan

SDGs ini hanya untuk mencapai dan mewujudkan lumbung pangan dan energi negeri saja maka tidak akan bisa memenuhi secara menyeluruh untuk menunjang

tingkat produktivitas pangan dan panen para petani. Maka dari itu jika Kabupaten Bojonegoro memang memiliki permasalahan tanah dan irigasi air maka pemerintah perlu mengenali wilayahnya terlebih dahulu, selanjutnya pemerintah harus memahami peta dan kondisi wilayahnya jika pembangunan seribu embung harus tetap dijalankan dan diterapkan.

Aspek sosial harus diperhatikan dalam pembangunan karena hal ini berpengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat sekitar. Dengan adanya komunikasi antara masyarakat dan dinas terkait maka persoalan seperti ini akan dapat segera diatasi dan tidak berlarut sampai menimbulkan konflik. Aspek sosial dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak yang terkait untuk melihat kondisi lapangan yang sebenarnya. Karena jika sudah berbicara tentang sosial maka harus bersifat adil untuk semua kalangan terutama masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan tersebut.

Dalam keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Dikaitkan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlanjutan ekologis. Pada pembangunan embung ini sangat memperhatikan aspek lingkungan dimana hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan embung ini juga bertujuan untuk mencegah banjir saat hujan, kurangnya persediaan air di saat musim kemarau juga menjadi tujuan utama dalam pembangunan ini.

Pembangunan embung ini tentunya akan mengakibatkan perubahan bentuk lahan dan bentang alam. Perubahan bentuk lahan ini disebabkan karena adanya pengerukkan tanah yang mengakibatkan lahan yang awalnya landai menjadi cekungan dan terisi air. Namun kategori kegiatan dalam pembangunan embung

tidak merusak lahan sekitarnya. Aspek-aspek lingkungan tentunya akan menjurus pada eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaru maupun tidak terbaru. Disini yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah air dimana air di kategorikan sumber daya alam yang dapat diperbarui.

Aspek lingkungan sangat rentan dengan kerusakan alam jika terjadi pembangunan sektoral. Pemerintah harus memperhatikan betul tentang lingkungan hidup karena hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Setelah adanya pembangunan seribu embung, masyarakat Kabupaten Bojonegoro lebih bisa memanfaatkan sumber daya alam secara optimal namun tetap dengan baik dan bijak. Karena dengan adanya pembangunan embung ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar apalagi pada musim kemarau tiba.

Signifikansi Program Pembangunan Seribu Embung Dalam Konsepsi Pembangunan Berkelanjutan.

Berkaca dari data-data yang ada maka program pembangunan embung di Kabupaten Bojonegoro belum bisa dikatakan signifikan dalam pelaksanaannya sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Apalagi melihat tujuan strategi tersebut juga digunakan untuk mewujudkan Visi besar pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan Lumbung Pangan. Untuk menuju kearah Lumbung Pangan saja ini masih sangat jauh menjangkau visi tersebut, apalagi untuk menjangkau tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan, program pembangunan ini juga belum bisa menjangkau ketiga aspek besarnya. Program pembangunan embung belum menyeluruh mengangkat perekonomian para petani, karena faktor pendukung meningkatnya produktifitas panen tidak hanya disebabkan oleh pembangunan embung saja, melainkan banyak faktor, contohnya Iklim, Penyuluhan

Petani, Bibit dan Pupuk. Dalam aspek sosial program pembangunan ini juga belum bisa menyeluruh membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah irigasi, karena dengan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh kebijakan tersebut maka peran masyarakat dan pemerintah terdapat batas yang disebabkan oleh reaksi masyarakat yang kontra dengan kebijakan program pembangunan seribu embung. Dengan adanya kondisi ekonomi dan sosial yang seperti itu maka aspek lingkungan juga mempunyai peran yang lebih karena alam banyak terlibat dalam pembangunan ini. Apabila program ini gagal maka kondisi lingkungan yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah adanya perubahan bentang alam yang dulunya landai akan menjadi banyak cekungan yang tidak memberikan manfaat dan mengurangi lahan produksi masyarakat apabila bangunan tersebut terbengkalai tidak digunakan.

Maka dari itu program pembangunan seribu embung belum secara maksimal dalam tujuan dan pemanfaatannya. Program pembangunan seribu embung masih dalam angan-angan yang jauh jika dilihat dari peta dan kondisi wilayahnya yang belum terlalu siap menerima pembangunan ini. Jadi bisa dikatakan bahwa program pembangunan seribu embung ini sangat dipaksakan dalam pelaksanaannya, tentunya ini akan menjadi masalah apabila kebijakan (*ouput*) ini tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat (*benefit*) ataupun *feedback* antara masyarakat dan pemerintah. Jadi akan sangat disayangkan apabila pembangunan ini hanya sekedar program pembangunan atau hanya sekedar perkembangan inovasi semata tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Karena sejauh ini juga belum ada evaluasi mengenai kebijakan pembangunan seribu embung yang sebenarnya sangat penting mengenai implementasi kebijakan itu sendiri.

KESIMPULAN

Pembangunan seribu embung ini sudah berjalan selama sembilan tahun lebih dan

akan berakhir pada tahun 2018. Selama pembangunan terdapat kendala yang tidak bisa diselesaikan yaitu keterbatasan dana dan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan embung. Dalam pembangunan tentunya terdapat dampak yang baik dan buruk bagi masyarakat, karena bagaimanapun pembangunan pastinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sustainable Development Goals dalam pembangunan pertanian berkelanjutan ini harus dapat merangkul aspek ekonomi, Sosial, dan Lingkungan sehingga tercapainya tujuan dunia dimana tidak adanya kelaparan, tercapainya ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan seribu embung dinilai sudah bisa mengentas kemiskinan masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara stabil, hal ini dapat dibuktikan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat lebih cenderung meningkat. Dan produksi panen yang dihasilkan dari pertanian juga meningkat, sehingga pembangunan ini dapat dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Namun strategi program pembangunan seribu embung ini hanya menjadi salah satu dari strategi pencapaian Visi lumbung pangan, karena dalam program ini tidak dibarengi dengan konsepsi yang jelas terkait SKPD yang bertanggungjawab sehingga pembangunan ini hanya menggunakan pendekatan secara teknik dan infrastruktur, tidak menggunakan pendekatan secara holistik. Hal ini yang membuat pembangunan tersebut tidak mempunyai arah secara baik setelah pemerintah lepas tangan setelah pembangunannya.

Dampak sosial setelah pembangunan embung juga dirasakan para petani dan masyarakat sekitar embung dimana keadilan sosial juga sudah dapat dirasakan dan diterima melalui ikatan norma

atau aturan yang ada. Dampak lingkungan ini hanya berdampak baik untuk masyarakat sekitar embung karena pembangunan seribu embung dalam jangka panjang nantinya bisa menjadi sebuah konservasi air yang dapat menghidupkan lingkungan yang dulunya tandus dan kering bisa menjadi asri dan sebagai tadah hujan atau resapan air.

Lebih spesifiknya lagi bahwa pembangunan ini hanya sekedar mencapai *output* saja tidak mengarah pada *outcome* yang nantinya akan menciptakan *feedback* terhadap pemerintahan. Kebijakan ini tidak dibarengi dengan konsep kedaulatan pangan yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena spesifik pembangunan embung ini sangat dipaksakan karena hanya menggunakan pendekatan teknis dan infrastruktur saja tidak menggunakan pendekatan secara holistik. Bagaimana seharusnya selain SKPD yang bertanggungjawab juga harus ada SKPD lain yang bersinergi membuat konsepsi pembangunan ini akan diarahkan kemana, sehingga setelah pembangunan maka akan ada alur pendayagunaan ke masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications.
- Penders, D. C. (t.thn.). *Bojonegoro 1900-1942 A Story Of Endemic Poverty in North-east-java-indonesia*.
- Subagyo, P. J. (1999). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV.ALFABETH.
- Sutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global . *Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB*.
- Sutisna. (2006). *Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Urban and Region Development Institute dan Yayasan Sugijanti Soegijoko.
- Wahab, A. S. (2005). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan dan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

A.H.Rahadian,2016. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan”, Volume II, No. 01, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Hlm 52

Dian Wahyudin, “Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Development Goals Di Indonesia” Volume III, No. 01, 2016. Hlm 35

SUMBER LAINNYA

Barito Raya, “Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Mineral”, 2009 dalam <https://antoniuspationom.wordpress.com/2009/08/03/otonomi-daerah-dan-pengaruhnya-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-mineral/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017

Griggs,D. 2013. *From MDGs to SDGs: Key Challeges and opportunities*. Jerman: Monash Sustainability Institute. <http://http://sustainabledevelopment.un.org/contact/documents/3490griggs.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air (diakses pada 18 Mei 2017)

